

## BAB II

### LATAR BELAKANG PELUNCURAN MAJALAH GEMA ISLAM

#### 2.1 Kondisi Sosial dan Politik Umat Islam Pada Masa Orde Lama

##### 2.1.1 Kondisi Politik Umat Islam

Republik Indonesia dalam pemerintahannya memilih menerapkan sistem demokrasi. Implementasi sistem ini di Indonesia kerapkali mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan penenerapan demokrasi sepanjang masa pemerintahan Orde Lama. Pada tahun 1945-1950 sistem pemerintahan Indonesia adalah bersifat presidensial. Sistem ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945. Pasal 4 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sementara pada pasal 17 menetapkan bahwa para Menteri diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden serta bertangung jawab kepada Presiden.<sup>36</sup> Terdapat dua tipe penerapan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama yaitu, Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Liberal (Parlementer) dilaksanakan pada kurun waktu 1950-1959. Karakteristik sistem ini terletak pada penerapan sistem multi partai, Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan, dan Presiden bertindak sebagai kepala negara. Pada praktiknya penerapan Demokrasi Liberal ini dianggap gagal disebabkan oleh kuatnya dominasi partai politik, lemahnya landasan sosial ekonomi Indonesia, dan konstituante tidak mampu

---

<sup>36</sup> Mustamin, Analisis Ketatanegaran Berdasarkan Historis Ketatanegaraan Republik Indonesia Periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 6(1), 2024, hlm. 83-84.

bersidang untuk mengganti UUDS 1950. Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit yang isinya 1. membubarkan konstituante, 2. kembali ke UUD 1945, 3. Membentuk MPRS dan DPAS. Terbitnya dekret Presiden 5 Juli 1959 ini menandakan berakhirnya masa penerapan demokrasi liberal di Indonesia, dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.<sup>37</sup>

Demokrasi Terpimpin adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1959-1965. Demokrasi ini dimaknai sebagai demokrasi yang terpusat pada pemimpinan negara baik secara pemikiran maupun pengambilan keputusan. Konsep Demokrasi Terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno, setidaknya memuat tiga hal pokok. Pertama adalah diperkenalkannya sistem pemerintahan baru yang kemudian akan dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Kedua bahwa untuk menjalankan konsep pemerintahan yang baru tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk membentuk sebuah kabinet yang terhimpun dari semua partai politik di Indonesia. Kabinet tersebut kemudian ia sebut sebagai kabinet gotong royong. Ketiga dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional masyarakat Indonesia seperti buruh, petani, tokoh agama, kaum muda, pengusaha nasional, golongan wanita, angkatan bersenjata, dan wakil-wakil dari daerah. Dewan Nasional ini dibentuk sebagai wujud dari pencerminan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Arif Wijaya, Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol 4(1), 2014, hlm. 159-140.

<sup>38</sup> Himawan Indrajat, Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi. *Jurnal Sosiologi* Vol 1(18), 2016, hlm. 58

Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin memiliki cita-cita untuk menyatukan semua kekuatan politik yang ada di Indonesia dengan satu gagasan besarnya yaitu NASAKOM ( Nasionalis, Agama, dan Komunis). Gagasan tersebut sebetulnya telah muncul dalam pemikiran politik beliau sejak masa pergerakan. Kekuatan agama, dan komunis menurut beliau berakar dari hal yang sama yaitu perlawanannya atas penindasan, dan penjajahan. Penyatuan dua kekuatan tersebut menurutnya dirasa mampu menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Pada pelaksanaanya di masa Demokrasi Terpimpin ide Presiden Soekarno tersebut menuai pro dan kontra. Sebagian kekuatan politik dan tokoh politik ada yang setuju akan gagasan tersebut, sebagian laginya menolak gagasan tersebut. Partai Komunis Indonesia menyetujui gagasan tersebut, sementara lawan politiknya yaitu Partai Masyumi menolak. Pertentangan politik yang terjadi pada masa tersebut pada puncaknya disikapi oleh pemerintahan Orde Lama dengan cukup keras. Mr. Mohammad Roem, HAMKA, M. Yunan Nasution, E.Z. Muttaqien, Kasman Singodimedjo, dan beberapa tokoh lainnya pernah merasakan penjara menjadi tahanan politik pada masa Orde Lama.<sup>39</sup>

Partai Masyumi sebagai salah satu partai yang mewakili umat Islam dalam perjuangan politik terus menegaskan sikap penolakannya terhadap ide Nasakom. Pertentangan rezim Soekarno dengan Masyumi semakin meruncing ketika adanya keterlibatan beberapa tokoh Masyumi dalam PRRI. Atas kejadian tersebut beberapa tokoh dari Masyumi diundang oleh Presiden

---

<sup>39</sup> Ketut Sedana Arta, Politik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966. *Jurnal Candra Sangkala*, Vol 4(1), 2022, hlm. 2-7.

Soekarno ke Istana Bogor pada tanggal 21 Juli tahun 1960. Seminggu berikutnya tokoh Masyumi yang diwakili oleh Prawoto Mangkusasmito<sup>40</sup> dan Yunan Nasution<sup>41</sup> kembali diundang oleh Presiden Soekarno kali ini ke Istana Merdeka dengan tujuan untuk memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Presiden kepada Masyumi sehubungan dengan dikeluarkanya Penpres no 7 tahun 1959. Partai Masyumi menjawab dengan tegas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemerintah dan menolak atas segala tuduhan yang disandarkan pada keterlibatan beberapa tokoh Masyumi dalam PRRI. Kedua tokoh tersebut menegaskan bahwa keterlibatan beberapa tokoh Masyumi dalam PRRI atas nama pribadi bukan atas nama partai. Lebih lanjut keduanya menegaskan bahwa saat itu status ketua umum Masyumi bukanlah Mohammad Natsir melainkan Prawato Mangkusasmito.<sup>42</sup>

Penolakan ini ditanggapi dengan serius oleh rezim Soekarno yang mulai menyusun cara yang legal kontitusional dalam menyingkirkan eksistensi Masyumi dalam peta politik Indonesia. Implementasinya adalah dengan membentuk logika revolusi dengan menyamakan bahwa pihak yang anti Nasakom adalah anti Pancasila. Cara ini dipilih atas pertimbangan yang matang mengingat Masyumi adalah partai Islam terbesar pada saat itu, sehingga akan menimbulkan sensitifitas yang tinggi apabila dilakukan

---

<sup>40</sup> Saat itu sebagai Ketua Umum Partai Masyumi.

<sup>41</sup> Saat itu sebagai Sekertaris Umum Partai Masyumi.

<sup>42</sup> Septi Eka Pratiwi, Pembubaran Partai Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 4(3), 2016, hlm, 1064-1065.

peyingkiran dengan cara yang non legal kontistusional. Pada akhirnya Masyumi dibubarkan berdasarkan Kepres no 200 tahun 1960.<sup>43</sup>

Demokrasi Terpimpin membawa umat Islam kepada dualisme politik yang berbeda walaupun pada esensinya sikap dari kalangan umat Islam adalah sama yaitu menolak peleburan ideologi Komunis dengan ajaran Islam karena keduanya merupakan satu ideologi yang sangat berbeda. Terdapat cara pandang yang berbeda dari partai-partai Islam pada saat itu dalam menyikapi sikap Pemerintah yang ingin menjalankan NASAKOM. Partai Masyumi secara tegas menolak ide tersebut yang berakhir pada pembubaran. Partai NU memilih sikap koopratif, dan berjuang dari dalam dengan masuk pada pemerintahan. Sikap ini pula diikuti oleh partai PSII, dan Perti yang kemudian mendirikan liga muslimin. Sikap politik yang ditempuh partai NU tersebut membawa peran politik umat Islam tetap terjaga dan membawa partai NU ke puncak peran politiknya.<sup>44</sup>

### 2.1.2 Kondisi Sosial Umat Islam

Kondisi umat Islam masa Orde Lama diwaranai dengan berbagai macam dinamika persoalan. Pertentangan ideologi, permasalahan pendidikan, persoalan kepemimpinan, dan persoalan sosial lainnya melanda umat Islam pada masa ini. Persoalan di kalangan internal umat Islam sendiri tidak kalah hebatnya pada saat itu mulai muncul tanda-tanda perpecahan yang menimpa umat Islam Indonesia yang dilandasi pada perbedaan mazhab, dan ijtihad.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Muhammad Rijal Fadli, Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang. *Jurnal Peradaban Islam* Vol 4(1), 2020, hlm, 40-47.

Permasalahan ini sejatinya telah muncul di tahun 1937 sebagai amana keterangan berikut ini:

Satu hal lagi jang perlu disinggung di sini, jang amat menjedihkan, ialah adanya tanda-tanda tentang akan timbulnya lagi pertentangan-pertentangan jang dulu pernah timbul di tahun 1937-an, ialah masalah “mazhab” dan “ijtihad.” Sering kali timbul sindiran-sindiran antara salah satu paham dengan lainnya.<sup>45</sup>

Persoalan tersebut kemudian diperparah dengan berbagai macam tantangan dari luar agama Islam seperti ancaman ideologi Komunis dan berkembangnya Kristenisasi yang terjadi pada masa itu. Ideologi Komunis pada saat itu berkembang dengan pesat dan mempengaruhi kehidupan beragama umat Islam. PKI sebagai partai yang mengusung ideologi ini dapat dengan cepat pulih, dan menjadi partai pemenang pemilu pada tahun 1955 setelah sebelumnya melakukan pemberontakan di tahun 1948. Hal ini terjadi di antara sebabnya adalah adanya kepemimpinan yang memiliki ide yang tegas, dan jelas serta dapat dipahami oleh para pengikutnya.<sup>46</sup>

Umat Islam di sisi lain belum mempunyai sosok kepemimpinan yang dapat menyatukan seluruh kalangan Islam. Pada saat yang sama perkembangan Agama Kristen sangat pesat bahkan melebihi dari pesatnya upaya Kristenisasi masa Kolonial. Proses Kristenisasi pada saat Kolonial tidak terlalu berhasil dikarenakan pada saat itu masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang belum dan tidak dimasuki oleh misi penyebaran agama. Belanda beranggapan bahwa jika proses penyebaran agama dilakukan di

---

<sup>45</sup> Majalah Gema Islam, Menara Mesjid Baiturachim Istana Merdeka Jakarta, *Majalah Gema Islam*, no 33, tahun 2, 1963.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 16.

daerah tertentu maka akan mengagu proses kolonialisasi Belanda yang menimbulakan pertentangan terhadap Pemerintah Kolonial. Terlebih lagi pada saat itu agama Kristen tidak dapat menarik perhatian bangsa Indonesia sehingga misi tersebut gagal. Berbeda dengan masa Orde Lama karena Indonesia telah merdeka maka proses Kristenisasi lebih pesat perkembangnya apalagi dengan adanya usaha untuk menasionalisasikan agama Kristen.<sup>47</sup>

Pendidikan Islam yang diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang menimpa umat Islam masa Orde Lama belum mampu menjawab tantangan tersebut. Kondisi pendidikan umat Islam pada saat itu juga memiliki berbagai macam persoalan. Perjuangan umat Islam dalam ranah pendidikan saat itu ialah memasukan pelajaran agama pada ranah sekolah umum. Karena pada umunya pendidikan Islam saat itu masih bersifat pada pendidikan di lembaga-lembaga tradisional seperti masjid, langgar, madrasah, dan pesantren.

Sampai berapa puluh tahun lamanja didikan agama Islam dilakukan di langgar, surau, dan pesantren sadja. Di sanalah pemuda Indonesia beladjar mengadji, beladjar mahir membataja Qur'an dan kemudian mempeladjari rukun dan hukum agama. Tetapi jang kebanjakan menjudahi pendidikan dengan chatam Qur'an sadja.<sup>48</sup>

Pondok pesantren saat itu memiliki kekurang dalam segi pembelajarannya yang hanya lebih terfokus pada pengetahuan agama dan memiliki sedikit perhatian pada pengajaran ilmu dunia yang menjadi bekal untuk penghidupan sehari-hari.<sup>49</sup> Kendati demikian dalam perjalanan sejarahnya pesantren

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Majalah Gema Islam, Hadji Agus Salim, *Majalah Gema Islam*, no 32, tahun 2, 1963.

<sup>49</sup> *Ibid*

memiliki peranan yang penting di masyarakat Islam Indonesia. Pesantren mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan eksistensinya sendiri sebagai lembaga pendidikan Islam yang independen. Pesantren memiliki keunikan dalam penerapan model pendidikannya yang multi aspek tanpa menghilangkan unsur agama sebagai kekuatan nilai dan tujuannya.<sup>50</sup>

Umat Islam yang menempuh pendidikan di sekolah umum tidak lepas dari permasahan kurangnya pelajaran agama yang diajarkan. Suasana belajar di sekolah umum berbeda dengan suasana belajar di langgar atau pesantren. Sekolah tidak memiliki kesanggupan dalam mendidik perasaan beragama yang dalam sebagaimana di pesantren karena sekolah lebih menekankan pada pendidikan pengetahuan umum. Sehingga lulusan dari sekolah akan memiliki kerdasan pengetahuan yang luas akan tetapi tidak dengan perasaan beragama. Maka pengajaran ilmu agama di sekolah umum sangat perlu dilakukan untuk menjawab permalahan tersebut. Di sisi lain pembangunan sarana pendidikan Islam yang berbasis sekolah juga perlu dilakukan baik pada tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.<sup>51</sup>

Kondisi sosial umat Islam pada masa Orde Lama mememiliki berbagai macam permasalahan. Para ulama yang menjadi tumpuan bagi umat Islam merespon permasalahan tersebut dengan berbagai cara dan upaya. Salah satunya dengan konsep dakwah dalam bentuk dakwah sosial dan politik yang terus diupayakan dalam membimbing dan membina umat Islam.

---

<sup>50</sup> Nurul Wakiah & Muhammad Yahdi, Telaah Historis Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 5(2), 2024, hlm. 106.

<sup>51</sup> Madjalah Gema Islam, Hadji Agus Salim, *loc. cit.*

## **2.2 Dakwah Sebagai Respon Ulama Terhadap Kondisi Sosial dan Politik Umat Islam Pada Masa Orde Lama**

### **2.2.1 Dakwah Politik**

Politik Islam adalah aktivitas politik dan cara pandang umat Islam yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai acuan.<sup>52</sup> Aspirasi umat Islam dalam berpolitik ditandai dengan dibentuknya suatu kelembagaan partai politik bernama Masyumi. Partai Masyumi dulunya adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1943 sebagai pengganti MIAI (Madjisul Islamil A'laa Indonesia). Pada masa pendudukan Jepang Masyumi belum menjadi partai politik melainkan sebuah kesatuan organisasi dari berbagai organisasi Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Dikeluarkanya maklumat Pemerintah no X tanggal 3 November 1945 yang isinya anjuran untuk pendirian partai-partai politik, maka umat Islam meresponya dengan diadakannya muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta dan pendirian partai Masyumi pada tanggal 7 November tahun 1945. Partai Masyumi dalam muktamar tersebut diputuskan sebagai satu-satunya partai politik umat Islam Indonesia.<sup>53</sup>

Partai Masyumi sebagai partai politik Islam yang mencerminkan dakwah Islam, memainkan perananya dalam perkembangan politik di Indonesia secara khusus pada masa pemerintahan orde lama. Peranan partai

---

<sup>52</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021, hlm 3.

<sup>53</sup> Ikrar, Partai-partai Islam di Indonesia (Latar Belakang dan Dinamika Perjalannya). *Jurnal Al-Syr'ah* Vol 1(2), 2003, hlm. 3.

Masyumi dalam pemerintahan Indonesia mengalami dinamika pada setiap masanya adakalanya Masyumi menjadi partai pemerintahan dan beberapa kali kadernya menjadi perdana menteri, adakalanya Masyumi juga memainkan perananya sebagai partai oposisi.<sup>54</sup>

Partai Masyumi kehilangan salah satu anggota istimewa-nya yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Keluarnya NU dari Masyumi adalah akibat adanya beberapa perselisihan, dan perbedaan cara pandang politik antara keduanya. NU secara resmi keluar dari Masyumi pada tahun 1952 setelah diadakanya Muktamar NU yang ke XIX di Pelembang dari tanggal 26 April-Mei 1952 dan menyatakan berdiri sebagai partai politik.<sup>55</sup> Keluarnya NU dari Masyumi memberikan dampak yang cukup besar terhadap mesin politik Masyumi yang kehilangan kekuatan basis pendukung NU yang militan berjuang bersama Msayumi. Akibatnya pada pemilihan umum tahun 1955 suara sebagian besar Umat Islam menjadi terpecah kedalam dua partai yaitu Masyumi dan Nu yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga sebagai partai pemenang pemilu tahun 1955. Pasca pemilu 1955 Majelis Kontituante berkumpul membahas masalah Undang-Undang Dasar dan masalah Dasar Negara, meskipun NU telah keluar

---

<sup>54</sup> Insan Fahmi Siregar, Pasang Surut Perang Politik Masyumi dalam Pemerintahan (1945-1960). *Forum Ilmu Sosial*, Vol 35(1), 2008, hlm. 20-25.

<sup>55</sup> Moh Amirul Muminin, Hubungan NU dan Masyumi (1945-1960) Konflik dan Keluarnya NU dari Masyumi, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 3(3), 2015, hlm. 491-492.

dari Masyumi namun keduanya sama-sama berjuang untuk menjadikan Islam sebagai Dasar Negara.<sup>56</sup>

Politik Islam pada masa Demokrasi Terpimpin memiliki dua peranan ada yang berjuang di luar pemerintahan, adapula yang berjuang dari dalam pemerintahan. Sikap politik Islam yang berjuang dari dalam pemerintahan contohnya adalah Partai Nahdlatul Ulama. Strategi tersebut dijalankan untuk mengimbangi kekuatan partai PKI dalam kekuasaan Presiden Soekarno. Salah satu tokoh dari partai NU yang memiliki peranan mengimbangi lobi politik PKI kepada rezim Soekarno adalah K.H Zainul Arifin Pohan. Beliau adalah salah satu tokoh terbaik dari NU di luar Jawa yang berhasil dalam pentas politik nasional pada masa itu beliau adalah Ketua dari DPR GR.<sup>57</sup>

Partai NU mengambil jalan sebagai partai yang berada di sisi pemerintahan. Kebijakan ini didasari oleh kepentingan NU yang mengutamakan perlindungan pada posisi umat Islam. NU cenderung mengeluarkan kebijakan yang fleksibel dalam menyikapi penerapan Demokrasi Terpimpin karena akan sangat berbahaya jika umat Islam lebih mengedepankan pertentangan kepada pemerintahan yang lebih besar kuasanya. Para Ulama dari kalangan NU lebih mengedepankan posisi strategis di dalam kekuasaan sebagai bentuk perjuangan politik Islam dari pada harus mengambil sikap oposisi dan berlawanan dengan pemerintah. Namun partai

---

<sup>56</sup> Martin Rizaldi, dkk, Dampak Keluarnya Nu dari Masyumi Terhadap Politik Indonesia 1952-1960, *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, Vol 9(2), 2023, hlm 129-131.

<sup>57</sup> Zulfadilah, K.H. Zainul Arifin Pohan Sebagai Panglima Santri Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol 1(2), 2022, hlm 216-217.

NU tetap pada prinsipnya sebagai partai Islam yang bekerja dan berkhidmat pada kepentingan Umat Islam meskipun ada di dalam pemerintahan.<sup>58</sup>

Partai Masyumi mengambil jalan lain dalam melakukan perjuangan politik. Posisi tegas ditempuh oleh Masyumi dengan menolak konsep NASAKOM dan berjuang di luar pemerintahan. Akibatnya kerapkali sikap politik Masyumi bertentangan secara langsung dengan pihak kekuasaan. Ketegangan antara Masyumi dan rezim Demokrasi Terpimpin terus meruncing hingga pada akhirnya berujung pada pembubaran Masyumi di tahun 1960. Pemerintah menganggap bahwa partai Masyumi telah memberontak kepada Negara melalui keterlibatan tokoh-tokoh partai tersebut dalam peristiwa PRRI. Hal tersebut kemudian dibantah oleh Ketua Umum Partai yaitu Prawoto Mangkusasmito yang menyatakan bahwa yang terlibat dalam PRRI adalah atas nama pribadi bukan atas nama partai.<sup>59</sup>

Politik umat Islam di Indonesia berdasarkan pada uraian di atas bersifat dinamis dan memiliki kontribusi yang besar. Baik saat berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan kontribusi peran politik umat Islam sangat besar terhadap pembangunan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

---

<sup>58</sup> Andri Nurjaman, dkk, Tokoh Politik Era Orde Lama Indonesia: Kajian Pemikiran KH Idham Chalid dalam Menerima Konsep Demokrasi Terpimpin Tahun 1965, *Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, Vol 4(1), 2022, hlm 66-68.

<sup>59</sup> Khuswatun Hasanah dan Mhd. Alfahjri Sukri, Sikap Politik Prawoto Mangkusasmito Terhadap Pembubaran Partai Islam Masyumi Pada Masa Demokrasi Terpimpin, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol 14(1), 2022, hlm 5-17.

## 2.2.2 Dakwah Sosial

Dakwah sosial yang dilakukan oleh para Ulama pada masa Orde Lama lebih terfokus pada peletakan ideologi Islam di pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk. Sebagai pengganti dari Piagam Jakarta pemerintah membentuk kementerian agama yang secara khusus ditugaskan untuk mengurus keperluan kaum muslimin seperti pernikahan, wakaf, haji dan pelaksanaan pendidikan Islam.<sup>60</sup> Meskipun secara konstitusi Indonesia bukan sebagai negara agama akan tetapi kementerian yang dibentuk pada tahun 1946 ini memiliki fokus untuk mengatur urusan beragama bukan hanya satu agama melainkan lima agama yang diakui saat itu yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.<sup>61</sup> Dengan demikian langkah para Ulama dalam memperjuangkan terbentuknya masyarakat yang menjalankan nilai-nilai Islam diawali dengan proses pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama secara formal dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Desember tahun 1946 dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) dua menteri yaitu menteri pendidikan, dan menteri agama yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum negeri maupun swasta yang berada di bawah lingkungan kementerian pendidikan. Kementerian agama memiliki wewenang atas pelaksanaan pendidikan agama

---

<sup>60</sup> Inggris Kharisma, dkk, Islam dan Dakwah di Indonesia Pada Masa Kontemporer, *Jurnal Ta'limat, Budaya, Agama, dan Humaniora*, Vol 24(1), 2020, hlm 254

<sup>61</sup> Deliar Noer, *Administrasi Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1983, hlm 13.

di sekolah negeri maupun swasta sementara tanggung jawab mengelelola sistem pendidikan nasional berada pada wewenang kementerian pendidikan.<sup>62</sup>

Pendidikan Islam pada pelaksananya sempat mendapatkan perhatian serius dari umat Islam pada awal kemerdekaan. Setelah pemerintah mengubah muatan kurikulum melalui menteri agama Mukti Ali dari yang tadinya 100% agama, menjadi 70% muatan pengajaran umum dan 30% muatan agama. Meskipun begitu pemerintahan Orde Lama tetap memperhatikan pendidikan Islam dengan memberikan bantuan materil pada lembanga yang mengelola pendidikan Islam melalui Badan Pekerja Komunite Nasional Indonesia Pusat (BKNIP) pada tanggal 27 Desember tahun 1945. Sampai tahun 1959 pemerintah memutuskan untuk terus memberikan bantuan biaya pendidikan pada madrasah dan beberapa pesantren. Madrasah kemudian dikelola secara terintegrasi seperti pada sekolah umum di Indonesia, dengan beberapa tingakatan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Islamiah Muda), dan Madrasah Aliyah (Madrasah Islamiyah Senior).<sup>63</sup>

Ulama bukan hanya memperjuangkan pendidikan Islam di pesantren maupun madrasah saja akan tetapi memperjuangkan agar pelajaran agama dipelajari di sekolah umum. Salah satu tokoh yang memperjuangkan pendidikan Islam adalah Mahmud Junus yang berjuang memasukan pelajaran

---

<sup>62</sup> Muh Aidil Sudarmono, Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama. *Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, Vol 18(1), 2020, hlm. 23.

<sup>63</sup> Moch Khafidz Fuad Raya, Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru). *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 8(2), 2018, hlm. 233-234.

agama pada kurikulum nasional.<sup>64</sup> Selain melaksanakan pendidikan Islam melalui lembaga pendidikan madrasah dan di sekolah umum umat Islam mendapatkan pendidikan agama yang mendalam dari pondok pesantren. Lembaga ini merupakan lembaga yang telah lebih dahulu dalam menyediakan akses pendidikan agama bagi umat Islam.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah banyak melahirkan semangat perjuangan dalam menebarluan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pondok pesantren telah melahirkan para *da'i* yang memiliki keluasan ilmu, dan ketinggian akhlak yang siap melaksanakan dakwah kepada masyarakat muslim. Kehadiran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia sangatlah diperlukan, dan diterima oleh masyarakat muslim Indonesia di setiap masanya. Pada masa Orde Lama pesantren juga mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mulai menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada pendidikan formal. Upaya tersebut direalisasikan dengan pendirian madrasah-madrasah yang didirikan sebagai alternatif lain dari pendidikan agama yang dilakukan di pesantren tradisional. Langkah tersebut juga merupakan bentuk atisipasi cerdas dari pesantren yang melihat perkembangan zaman bahwa pola pendidikan yang terus berkembang dalam berbagai bentuk dan aspek penyelenggaranya termasuk semakin diminatinya pola pendidikan formal.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Deliar Noer, *op.cit*, hlm 62.

<sup>65</sup> Azhar Abdullah, Perekembangan Pesantren dan Madrasah di Indonesia dari Masa Kolonial Sampai Orde Lama, *Jurnal Paramita*, Vol 23(2), 2013, hlm. 198.

Ulama dalam dakwah sosial bukan hanya sebagai pendidik, dan pendakwah akan tetapi sebagai pemimpin umat dan pelaku agen pembangunan sosial.<sup>66</sup> Umat Islam Indonesia telah menjalankan perananya dalam membangun Indonesia lewat Politik dan Sosial. Peran adalah suatu aktifitas yang dijalankan oleh individu sosial ataupun kelompok sosial yang berdampak pada masyarakat yang sesuai dengan kedudukannya.<sup>67</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umat Islam sebagai salah satu kelompok sosial pada masyarakat Indonesia telah melakukan peranannya sesuai dengan kapasitas dan porsinya dalam fungsi sosial. Peran ini diwujudkan dengan ikut sertanya umat Islam dalam pengelolaan kebijakan politik dan sosial di Indonesia. Penyebaran norma keagamaan menjadi aspek yang penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Majalah Gema Islam sebagai salah satu wujud nyata dari umat Islam dalam membangun masyarakat Indonesia lewat pengajaran, dan pembelajaran. Konten dakwah yang termuat dalam majalah Gema Islam merupakan kesadaran para *da'i* dalam menjalankan fungsi sosialnya yaitu sebagai pendidik bagi masyarakat dengan jalan dakwah.

### **2.3 Pers Masa Orde Lama**

Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1960 menerapkan satu sistem pemerintahan yang disebut Demokrasi Terpimpin. Dasar dari sistem pemerintahan ini adalah MANIPOL USDEK akronim dari Manifesto Politik dan Undang-Undang Dasar 1945,

---

<sup>66</sup> Ahdi Makmur, *Ulama dan Pembangunan Sosial*. Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2016, hlm, 83-109

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisiologi Suatu Pengantar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Sosialis, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Gagasan tersebut diucapkan oleh presiden Soekarno pada pidatonya di Istana Negara tanggal 17 Agustus 1960. Pidato tersebut diberi judul “Malaikat Turun dari Langit Jalanya Demokrasi Kita” pidato tersebut didengarkan oleh puluhan ribu rakyat Indonesia yang hadir pada saat itu.<sup>68</sup> Pada masa tersebut MANIPOL USDEK juga merupakan sebuah panduan yang harus dikuti oleh media massa dan pers di Indonesia. Panduan tersebut harus diikuti dan diterima oleh pers sebagaimana yang dikehendaki oleh penguasa. Para pendukung kebijakan pemerintahan MANIPOL USDEK menyebutnya dengan istilah *Manifest Destiny* (Manipesto Takdir) karena mereka menganggapnya sebagai sebuah perintah yang dianggap berkah, dan tidak boleh dibantah. Pers yang bersebrangan dengan kekuasaan pemerintah menganggap MANIPOL USDEK sebagai *Manipold Irony* (Ironi Berlipat ganda) karena dianggap kebijakan tersebut tidak masuk akal dan sering bertangan juga sarat akan slogan.<sup>69</sup>

Pemerintah pada saat itu menyatakan sikap, dan pendapatnya terhadap pers di Indonesia, sikap tersebut disampaikan oleh Roeslan Abdulgani yang pada saat itu ditunjuk sebagai JUBIR USMAN (Juru bicara USDEK-MANIFOL). Ia menyatakan bahwa pers harus dijadikan sebagai alat revolusi yang belum selesai, dan bagi pers yang tidak mau mendukung MANIPOL USDEK lebih baik untuk mundur dari dunia pers atau akan ditenggelamkan sendiri oleh arus dari revolusi itu sendiri. Pernyataan tegas tersebut tidak

---

<sup>68</sup> Rusydi Hamka, *op.cit*, hlm. 173-174.

<sup>69</sup> Andi Suwirta, Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia Pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional, *Jurnal Sosiohumanika* Vol 1(2), 2008, hlm. 63.

hanya disampaikan oleh juru bicara Roeslan Abdulgani saja, akan tetapi pernyataan yang lebih tegas disampaikan langsung oleh Presiden Soekarno pada saat beliau melantik pimpinan kantor berita Antara. Ia menegaskan bahwa Antara harus menjadi bagian dari yang mendukung revolusi dan melawan musuh-musuh revolusi yang menurutnya musuh dari revolusi itu adalah imperialisme gaya baru dan kampitalisme beserta antek-anteknya.<sup>70</sup>

Media massa setelah keluarnya sikap pemerintahan tersebut, merubah sikapnya seolah mereka berlomba menjadi bagian yang paling pro revolusi (pro pemerintahan). Media yang dengan aktif mendukung wacana pemerintahan tersebut di anataranya adalah surat kabar Harian Rakjat, Bintang Timur, Warta Bhakti, Suluh Indonesia, dan Duta Masyarakat. Surat kabar tersebut merupakan surat kabar yang dimiliki oleh beberapa partai politik yaitu PKI, PNI dan NU. Pada kenyataanya sikap pemerintah tersebut direalisasikan pada beberapa media massa yang memang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintahan seperti Surat Kabar Abadi, Pedoman, dan Majalah Pandji Masyarakat yang dikemudian hari kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya karena bersebrangan dengan sikap pemerintah.

Majalah Pandji Masyarakat yang disebut di atas adalah majalah yang kelak akan menjadi cikal bakal kelahiran dari majalah Gema Islam. Gema Islam menjadi penerus Pandji Masyarakat sebagai media dakwah Islam di Indonesia mulai dari tahun 1962-1967. Pandji Masyarakat adalah majalah yang terbit pada bulan Januari tahun 1959 merupakan media masa Islam yang

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 64.

banyak digemari oleh masyarakat pada saat itu. Penyebabnya adalah karena pada saat itu di Indonesia masih sangat kurangnya sumber bacaan dan terkhusus yang memuat informasi keislaman. Pada saat itu Pandji Masyarakat sangat laku di pasaran dan dijual keseluruh pelosok Indonesia, namun pada kenyataanya Pandji Masyarakat pernah berhenti terbit di tahun 1960 karena pada salah satu edisinya tepatnya pada edisi nomor 22 Pandji masyarakat memuat salah satu tulisan dari mantan wakil Presiden Indonesia yaitu Mohammad Hatta yang berjudul Demokrasi Kita.<sup>71</sup> Sebagai ganti dari dilarangnya majalah Pandji Masyarakat maka para tokoh pendiri majalah tersebut atas ajakan dari para tokoh ABRI menerbitkan satu majalah baru yang dinamai Gema Islam.

Majalah Gema Islam mulai dirintis penerbitannya pada bulan Juli tahun 1961. Saat itu muncul ajakan dari tokoh militer kepada ulama untuk kembali melakukan proses dakwah seperti yang diungkapkan oleh Rusydi Hamka putra dari Buya Hamka dalam bukunya *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* sebagai berikut,

Sekitar bulan juli 1961, Letjen Sudirman mengajak Ayah mendirikan Perpustakaan Islam di Masjid Agung Al-Azhar. Ayah menerima ajakan itu, hingga dengan mendirikan sebuah Yayasan Perpustakaan Islam Pusat.<sup>72</sup>

Yayasan Perpustakaan Islam Pusat nantinya yang akan menjadi penerbit dari Majalah Gema Islam. Yayasan Perpustakaan Islam Pusat ini didirikan pada tanggal 13 Rajab tahun 1380 H bertepatan dengan tanggal 1 Januari tahun 1961 M. Pada saat pertama pembukaan yayasan tersebut. Diadakanlah sebuah

---

<sup>71</sup> Roni Tabroni, *op.cit*, hlm. 41-42.

<sup>72</sup> Rusydi Hamka, *op.cit*, hlm. 176.

upacara peresmian uniknya acara tersebut dihadiri oleh orang-orang yang bisa dikatakan sebagai orang dekat atau mewakili pemerintahan pada saat itu. Artinya pemerintah pada saat itu menyetujui pendirian yayasan perpustakaan Islam. Tokoh-tokoh yang hadir dalam peresmian tersebut adalah, Fatmawati, Ruslan Abdulgani, dan Jenderal A.H. Nasution. Ketiga tokoh tersebutlah yang melakukan prosesi gunting pita pada upacara peresmian Yayasan Perpustakaan Islam Pusat. Peresmian tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun 1380 H bertepatan dengan 4 Februari tahun 1961.<sup>73</sup>

Komunikasi kebangsaan antara tokoh militer yang pada saat itu diwakili oleh Letnan Jenderal Soedirman dan Letnan Kolonel Muchlas Rowi dengan tokoh ulama yang pada saat itu diwakili oleh Buya Hamka kian hari semakin hangat, dan akrab. Puncaknya pada saat perayaan Idul Fitri di tahun 1380 H, Majid Agung Al-Azhar mengadakan sholat ied yang dihadiri oleh Jendral A.H. Nasution. Sejak saat itu dakwah yang dilakukan di Masjid Agung Al-Azhar menjadi semakin semarak dan bukan hanya dalam bentuk ceramah tapi dakwah dilakukan dalam bentuk lainnya seperti pementasan drama. Pada saat itu lebih dikenal dengan pementasan arena. Saat perayaan Maulid Nabi di Masjid Agung Al-Azhar diadakanlah pementasan arena yang berkisah pada penyerangan Raja Abrahah yang mau menghancurkan Ka'bah di Mekah yang kemudian dihancurkan oleh Allah dengan menurunkan pasukan burung Ababil. Pementasan tersebut dilakukan oleh HSBI (Himpunan Seni Budaya Islam) di bawah pimpinan Mayor M. Yunan Nasution. Pementasan tersebut

---

<sup>73</sup> Majalah Gema Islam, Mesjid Agung Al-Azhar, *Majalah Gema Islam* no 1 tahun 1, 1962.

dihadiri dan disaksikan oleh ribuan umat Islam di sela-sela pementasan tersebut Letnan Jendral Sudirman didampingi oleh Letnan Kolonel Muchlas Rowi menemui Buya Hamka. Mereka datang untuk menyampaikan sebuah pesan dari Jendral Nasution yang mengajak kepada Buya Hamka untuk menerbitkan kembali majalah yang menurut usul beliau bernama Majalah Gema Islam.<sup>74</sup>

Buya Hamka terus mempertimbangkan ajakan tersebut, seraya meminta usul kepada para ulama lainnya yang beliau temui untuk dimintai pendapatnya. Di antara ulama yang dimintai pendapatnya oleh Buya Hamka adalah, K.H. Fakih Usman<sup>75</sup> yang beliau temui secara langsung di rumahnya. K.H. Fakih berpendapat bahwa usulan untuk melakukan dakwah Islam melalui penerbitan majalah seyogyanya diterima. Setelah menerima nasehat tersebut pada akhirnya usulan penerbitan majalah tersebut diterima. Buya Hamka memegang penuh kendali atas majalah tersebut, meskipun nama beliau tidak tercantum sebagai pemimpin umum Majalah Gema Islam. Pimpinan umum pada penerbitan majalah ini tertulis nama Sudirman dan Mukhlis Rowi sebagai penanggung jawabnya. Adapun Buya Hamka mengusulkan puteranya yaitu Rusydi Hamka sebagai pimpinan redaksinya, sebagaimana ungkapan H. Rosihan Anwar dalam Artikelnnya yang berjudul *Hamka dan Gema Islam dan Kumandang Dakwah*, menyatakan sebagai berikut,

---

<sup>74</sup> Rusydi Hamka, *op.cit*, hlm. 177.

<sup>75</sup> K.H. Fakih Usman merupakan seorang ulama, politikus Masyumi, dan tokoh dari Muhammadiyah.

Pada awal tahun 1962 Yayasan Perpustakaan Islam Pusat menerbitkan majalah pengetahuan dan kebudayaan Islam bernama Gema Islam dengan pemimpin waktu itu Mayor Jendral Sudirman, penanggung jawab Kolonel M. Rowi, pimpinan redaksi Rusydi Hamka.<sup>76</sup>

Majalah Gema Islam secara resmi terbit dengan nomor perdannya pada tanggal 15 Januari tahun 1962. Terbit setiap sebulan dua kali dan dijual keseluruh Indonesia.

Majalah Gema Islam hadir dengan tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan dakwah Islam yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Islam pada umunya. Dakwah yang dimuat dalam majalah ini dikemas menarik dalam beberapa rubrik yang tersaji. Penguatan kekuatan keimanan terhadap kaum muslimin menjadi bagian yang paling ditekankan dalam tujuan dakwah ini. Terlebih lagi bahwa majalah ini diterbitkan untuk ikut berkontribusi dalam pola pembangunan semesta berencana. Pola pembangunan ini adalah pola yang dilakukan untuk menjadikan negara dan bangsa Indonesia setaraf dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia, artinya pola pembangunan ini adalah merupakan kerja kebangunan dan pembangunan yang berifat masif dan dilakukan secara besar-besaran. Pokok penting yang harus dibangun guna mencapai tujuan tersebut adalah kebangunan unsur manusianya. Pembangunan manusia Indonesia dimulai dengan penguatan mental dan rohani yang dengannya akan tercipta suatu kekuatan manusia yang kuat secara jiwa dan raganya. Kekuatan raga manusia lahir dari kekuatan jiwa dan agama merupakan sumber dari kebangunan jiwa itu. Majalah Gema Islam merupakan bagian dari karya anak bangsa yang hadir berkontribusi dalam rencana

---

<sup>76</sup> H. Rosihan Anwar, Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1978, hlm. 155.

pembangunan tersebut. Komitmen Majalah Gema Islam tersebut bisa dilihat di pembuka kata pada Majalah Gema Islam edisi no 1 tertanggal 15 Januari tahun 1962 bunyinya sebagai berikut.

Pembangunan Semesta Berentjana adalah pembangunan bangsa dan tanah air besar-besaran, meliputi segala bidang, jang lajak duduk setara dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini.<sup>77</sup>

Terbitnya Majalah Gema Islam di tengah-tengah masyarakat muslim menjadi satu hal yang penting dalam pembangunan jiwa masyarakat muslimin melalui edukasi yang disalurkan melalui konten-konten dakwah yang ada di Majalah Gema Islam. Komitmen tersebut sekaligus meneguhkan bahwa Majalah ini memang merupakan media massa Islam.<sup>78</sup>

Majalah Gema Islam menjadi media massa Islam yang menyebarluaskan informasi keislaman kepada masyarakat Indonesia dari tahun 1962-1967 secara konsisten. Tantangan dakwah yang dihadapi oleh majalah ini besar, karena pada masa itu telah terjadi pergolakan politik, dan ideologi di Indonesia. Beberapa kontributor dalam majalah ini di antaranya ada yang menggunakan nama pena agar terhindar dari jangkauan kekuasaan untuk dibungkam di antaranya adalah, H. Rosihan Anwar yang memakai nama pena Al- Bahist. Meskipun demikian pada akhirnya majalah ini tetap bisa terbit hingga tahun 1967 sebelum terbit kembali majalah Pandji Masyarakat.

---

<sup>77</sup> Majalah Gema Islam, Mesjid Agung Al-Azhar, *op.cit*, hlm. 3

<sup>78</sup> Roni Tabroni, *Media Massa Islam Sejarah dan Perannya di Masyarakat*, Yogyakarta: Calpulis, 2017